

**SKRIPSI**  
**KEJAHATAN SPIONASE YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT**  
**DIPLOMATIK**  
**(STUDI KASUS PENYADAPAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK**  
**AUSTRALIA TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH INDONESIA)**



**Diajukan oleh:**

**Albertus Ardian Prastowo**

**NPM : 120510838**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

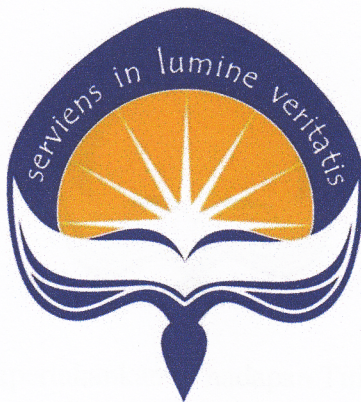
**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**KEJAHATAN SPIONASE YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT  
DIPLOMATIK**

**(STUDI KASUS PENYADAPAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK  
AUSTRALIA TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH INDONESIA)**



**Diajukan oleh:**

**Albertus Ardian Prastowo**

**NPM : 120510838**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada Tanggal 12 Maret 2016**

**Oleh Dosen Pembimbing**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KEJAHATAN SPIONASE YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT  
DIPLOMATIK**

**(STUDI KASUS PENYADAPAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK  
AUSTRALIA TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH INDONESIA)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 15 April 2016**

**Tempat : Ruang Dosen B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28, Yogyakarta.**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**Sekretaris : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**

**Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**PX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

## HALAMAN MOTTO

BERJUANG DAN MENANG

–Kavaleri–

GUSTI MESTHI PARING DALAN

–No Name–

MENSYUKURI HARI INI,  
MENGIKHLASKAN APA YANG TELAH  
BERLALU

–No Name–

KASIHILAH MUSUHMU DAN BERDOALAH BAGI  
MEREKA YANG MENGECEWAKANMU,  
APABILA KAMU MENGASIHI ORANG YANG  
MENGASIHIMU APAKAH LEBIHMU,  
SEBAB ORANG YANG TIDAK MENGENAL TUHAN  
PUN BERBUAT DEMIKIAN

–Sang Guru Sejati–

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan hukum/skripsi ini penulis persembahkan terutama untuk:

Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis ketika penulis menghadapi tantangan dan kesulitan

Bapak dan Ibu penulis, Aloysius Prayitno Widodo dan Lidwina Yudianti, yang tidak pernah berhenti berjuang setiap hari demi penulis

Kakak penulis, Mas Toni dan Mbak Maia serta Mas Andre dan Mbak Heni

Keponakan penulis, Jovia, Onel dan Bintang

## **KATA PENGANTAR**

Setiap sungai pasti akan bermuara pada hilir dan setiap gunung pasti akan selalu berkahir pada puncak, tak ubahnya sebuah perjuangan akan selalu berakhir dengan rasa syukur. Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala pencapaian saat ini, khususnya atas kelancaran dalam proses penyusunan skripsi dengan judul: Kejahatan Spionase yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik. Sejak tahap awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan dan bantuan serta dukungan kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan banyak waktu, pikiran dan dengan sabar membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
4. Segenap dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mendukung penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Staff Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, khususnya Pak Agus, yang telah menerima penulis dengan baik sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar.
6. Sdr. Aloysius Selwas Taborat, S.H., LL.M., selaku Kepala Seksi Hukum Politik dan Keamanan Sub Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, yang telah bersedia diwawancari oleh penulis dan telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
7. Keluarga Ignatius Suwaji dan Keluarga Antonius Adityo Purwoko, atas segala bantuan yang diberikan selama penulis melakukan penelitian di Jakarta.
8. Bapak dan Ibu penulis, yang senantiasa memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.
9. Bapak G. Sri Nurhartanto, Ibu Maria Immaculata Sumarminingsih, Fr. Albertus Edwin Nur Istanto, MSF., Sdri. Anna Anindita Nur Pustika dan Sdri. Amelia Nur Puspita, atas segala keramahan dan kehangatan serta nasihat yang diberikan sehingga penulis bersemangat kembali.
10. Romo Fransiskus de Sales Suharto Widodo Pr, yang senantiasa memberikan dukungan doa kepada penulis.
11. Teman-teman penulis, baik teman di kampus, teman di kegiatan kemahasiswaan, maupun teman-teman kos, yang selalu mendukung penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karenanya penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang berguna bagi penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat



kesalahan dalam kalimat atau penggunaan kata yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati para pembaca. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai pengetahuan tambahan mengenai hukum diplomatik dan konsuler. Tuhan memberkati.

Yogyakarta, Maret 2015

Penulis



## ABSTRACT

*The title of this thesis is Espionage Delinquency Committed by Diplomatic Agent (Case Study of Illegal Interception Committed by Australia Ambassador towards Officials Government of Indonesia). The legal issue of this thesis is the fact that diplomatic agent often involves criminal offences in the receiving state; one of them is espionage act. Then the purpose of this thesis is to find out the legal consequences of espionage delinquency committed by diplomatic agent related to the case of Illegal Interception Committed by Australia Ambassador towards Officials Government of Indonesia.*

*The method of this research is literature research. Automatically, the kind of this research is normative law research which is a research focused on positive law norms. The positive law norms include Vienna Convention 1961, Vienna Convention 1969, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Convention, Budapest Convention 2001 on Cybercrime, bilateral agreement between Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation and other regulations which related to the research object. In addition to positive law norms, this research also uses other resources as supporting data. It is obtained from the result of interview with resource person, books, article on journals and newspaper.*

*Based on the Vienna Convention 1961 Article 3 and Article 41 verses (1) and (3), the agent diplomatic has basic obligations to perform his function in receiving state. These basic obligations are not to interfere in the internal affairs of receiving state and to respect the laws and regulations of the receiving State. If the agent diplomatic involves espionage act, it indicates that the agent diplomatic has violated the provisions of Vienna Convention 1961 Article 3 and Article 41 verses (1) and (3). In the case of Indonesia and Australia, the illegal interception which committed by the Australia Ambassador has violated the provisions of Agreement between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation Article 2 verse (2). Certainly, these violation have some legal consequences because the injured state, in this case is Republic of Indonesia, will take some measures to ensure reparation and cessation of espionage act.*

*The result of this research are the receiving state can declare persona non grata to diplomatic agent who committing espionage act, but in certain case, the receiving state can request the sending state to waive the immunity and inviolability of diplomatic agent. In the case of Indonesia and Australia, the Indonesia government takes some responses, these are: sending protest note to Australia ambassador, recalling Indonesia ambassador in Canberra and reviewing bilateral treaty and cooperation between Indonesia and Australia, which it can be qualified as countermeasure.*

**Keywords:** *Espionage Delinquency, Diplomatic Agent, Illegal Interception.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Konsep Kejahatan Spionase .....	22
1. Konsep Kejahatan dalam Hukum Internasional .....	22

2. Tinjauan Umum tentang Spionase .....	26
B. Tinjauan Umum tentang Pejabat Diplomatik .....	30
1. Pengertian dan Fungsi Pejabat Diplomatik .....	30
2. Macam dan Dasar Pemberian Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik .....	31
3. Tindakan Spionase sebagai Tindakan Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik .....	40
C. Konsekuensi Hukum atas Kejahatan Spionase yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik .....	41
1. Konsekuensi Hukum atas Kejahatan Spionase Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik .....	41
a. <i>Waiver of Diplomatic Immunity</i> .....	42
b. <i>Persona non Grata</i> .....	47
2. Konsekuensi Hukum atas Tindakan Penyadapan yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik Australia terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia .....	52
a. <i>Recall</i> .....	53
b. Nota Protes .....	55
c. Peninjauan Ulang Perjanjian dan Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia .....	58
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

DAFTAR PUSTAKA .....	83
----------------------	----

#### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : <i>Agreement between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty)</i> .....	86
Lampiran II : Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan.....	93
Lampiran III : <i>Joint Understanding on A Code of Conduct between The Republic of Indonesia and Australia in Implementation of The Agreement between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation</i> ...	100

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Maret 2016

Yang menyatakan,

Albertus Ardian Prastowo